

SEKURITISASI TERHADAP PARA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI AUSTRALIA TAHUN 2021 - 2023

Catherine Andrea Marselamitha

Department of International Relations
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: catherineaamm@gmail.com

Muharjono

Department of International Relations
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Email: muharjono.msi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses sekuritisasi Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka di tahun 2021-2023 dengan tujuan untuk memahami pandangan dan keputusan Australia dalam mensekuritisasi isu terkait pengungsi dan pencari suaka. Melalui penelitian ini, bahasan akan dikaji dengan menggunakan teori sekuritisasi untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan oleh Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka merupakan bentuk tindakan sekuritisasi. Data diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan dari *speech act* yang diberikan oleh Scott Morrison dan Anthony Albanese di tahun 2021-2023 untuk menjadikan kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Australia sebagai isu yang mengancam keamanan, baik itu keamanan para pengungsi dan pencari suaka sendiri dari ancaman tenggelam di laut maupun keamanan masyarakat Australia dari adanya kekhawatiran akan terjadinya *transnational crime* akibat kedatangan pengungsi dan pencari suaka yang melalui jalur ilegal dari laut. Sebagai bentuk *emergency measures* dari *speech act* yang diberikan, kebijakan terkait seperti kebijakan detensi di fasilitas penahanan dan kebijakan perlindungan perbatasan melalui patroli di kawasan laut Australia pun diterapkan.

Kata kunci : Sekuritisasi, Australia, Pengungsi, Pencari Suaka

ABSTRACT

This research discusses Australia's securitization process towards refugees and asylum seekers in 2021-2023 with the aim of understanding Australia's views and decisions in securitizing issues related to refugees and asylum seekers. Through this research, the discussion will be examined using securitization theory to analyze how Australia's implementation of policies towards refugees and asylum seekers is a form of securitization. Data was obtained using the literature study method from speech acts given by Scott Morrison and Anthony Albanese in 2021-2023 to make the arrival of refugees and asylum seekers in Australia as a security issue, both the security of refugees and asylum seekers themselves from the threat of drowning at sea and the security of Australia from concerns about transnational crime due to the arrival of refugees and asylum seekers through illegal routes from the sea. As a form of emergency measures from the given speech act, related policies such as detention policies in detention facilities and border protection policies through patrols in Australian sea areas were then implemented.

Keywords : Securitization, Australia, Refugees, Asylum Seekers

PENDAHULUAN

Kedatangan para imigran yang tergolong sebagai pengungsi dan pencari suaka ke Australia disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah untuk menghindari konflik dan kondisi hidup yang buruk karena peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia II di tahun 1940-an, konflik Rohingya di tahun 1960-an, dan Revolusi Industri 3.0 di tahun 1970-an. Pada masa itu, kebanyakan dari para pengungsi dan pencari suaka datang ke Australia melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu, sehingga mereka dikenal dengan sebutan 'orang perahu' atau *boat people* (Karlsen et al., 2011).

Pada tahun 1954, Australia menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu sendiri menerapkan satu prinsip inti, yaitu prinsip *non-refoulment*, yang berarti setiap negara yang menandatangani konvensi tersebut tidak boleh mengembalikan kembali para kelompok yang digolongkan sebagai pengungsi ke negara asal mereka dimana nyawa atau hak kebebasan mereka dalam keadaan terancam (UNHCR, 2024). Sebagai salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut, Australia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia para kelompok pengungsi yang datang, tanpa memperhatikan dengan cara apa mereka datang ataupun dari negara mana mereka berasal (Australian Council of Trade Unions, 2021).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Fraser di tahun 1977, Australia menetapkan program kemanusiaan pertama kalinya untuk menangani masalah terkait pengungsi dan pencari suaka, termasuk hal penentuan klaim perlindungan. Semenjak diterapkannya program tersebut, imigran yang ingin memasuki Australia akan masuk melalui dua program yang berbeda, yaitu program migrasi atau melalui program kemanusiaan, yang ditujukan untuk para pengungsi dan pencari suaka. Dalam program kemanusiaan, pengungsi dan pencari suaka yang datang tidak melalui jalur daratan akan ditawarkan pemukiman kembali di Australia. Sebagian besar pengungsi yang datang tidak melalui jalur darat tersebut dirujuk ke Australia oleh UNHCR dan akan secara resmi diterima dan dimukimkan di Australia di bawah kategori pengungsi (Phillips, 2017).

Gelombang pertama *boat people* di Australia datang pada tahun 1976 setelah dimulainya Perang Vietnam, dimana jumlah kedatangan terus meningkat sampai tahun 1981. Kedatangan *boat people* tersebut kemudian ditangani melalui program kemanusiaan yang diinisiasi oleh Fraser. Kedatangan gelombang kedua dimulai pada tahun 1989-1998, dimana sebagian besar berasal dari negara Cina bagian selatan, Kamboja, dan juga Vietnam. Pada kedatangan gelombang kedua ini sendiri, respon pemerintah Australia jauh berbeda dimana mulai diterapkan pemrosesan lepas pantai dan melakukan penahanan terhadap orang perahu tersebut di berbagai fasilitas detensi (Muharjono & Akbar, 2023).

Di tahun 2001, pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard, terjadinya peristiwa MV Tampa menjadi salah satu bentuk awal sekuritisasi terhadap para pengungsi dan

pencari suaka di Australia. Pada saat kapal MV Tampa yang membawa para pengungsi dan pencari suaka memasuki wilayah perairan Australia, Howard mengerahkan pasukan *Australian Border Force* (ABF) untuk mengamankan kapal tersebut dan semua pencari suaka di dalam kapal kemudian dipindahkan ke wilayah lain seperti New Zealand, Pulau Nauru, dan Papua Nugini (Deliyannis, 2020). Semenjak peristiwa tersebut, para pencari suaka yang datang ke Australia melalui jalur laut akan di proses di pusat-pusat akomodasi di luar negeri yang didanai oleh pemerintah Australia, yaitu di Pulau Nauru dan juga Pulau Manus.

Kebijakan oleh Howard tersebut menjadi bentuk sekuritisasi nyata pertama terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia, dimana penerapan kebijakan yang keras dan restriktif dilanjutkan pada masa pemerintahan perdana menteri selanjutnya. Pada tahun 2010, Julia Gillard menerapkan kebijakan yang berprinsip "*no document, no entry*". Melalui kebijakan tersebut wilayah daratan Australia ditutup bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang dengan menggunakan perahu dan tidak memiliki dokumen yang sah (Azmi & Dirgantara, 2023). Di tahun 2013, kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) diperkenalkan oleh Tony Abbott yang bertujuan untuk mencegah dan memutarbalikkan kapal yang memasuki jalur laut secara ilegal, termasuk kapal yang membawa para pengungsi dan pencari suaka.

Penerapan kebijakan yang restriktif dan tegas oleh pemerintah Australia terhadap para pengungsi dan pencari suaka, terutama mereka yang datang melalui jalur laut, memperlihatkan kontras yang jelas bahwa walaupun Australia merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi Pengungsi, Australia justru menjalankan kebijakan yang mempersulit para pengungsi dan pencari suaka dalam mencari tempat perlindungan. Maka dari itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana proses sekuritisasi Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia di tahun 2021-2023 dijalankan untuk menganalisis keputusan Australia dalam membentuk, menentukan, dan melaksanakan kebijakan terkait pengungsi dan pencari suaka selama dilakukannya proses sekuritisasi sehingga dapat dipahami bagaimana pandangan dan perilaku Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka sebenarnya.

KERANGKA ANALISIS

Melalui teori sekuritisasi, dapat diketahui bahwa kebijakan keamanan nasional yang diciptakan suatu negara bukanlah hal yang terjadi secara sendirinya, melainkan kebijakan tersebut muncul karena telah dirancang sesuai dengan keadaan dan kondisi negara oleh para politisi dan juga pengambil keputusan (Eroukmanoff, 2018). Dalam konsep sekuritisasi, sebuah permasalahan atau isu politik biasa akan diberikan label sebagai sebuah permasalahan atau isu "ekstrem" yang dapat mengancam keamanan nasional suatu negara, dimana label itu sendiri diberikan oleh aktor sekuritisasi yang memiliki kekuatan sosial dan institusional untuk mengartikulasikan permasalahan atau isu tersebut sebagai sebuah hal yang harus segera ditangani atau diselesaikan.

Konsep sekuritisasi muncul dari *Copenhagen School* (CS), yang berasal dari *The Copenhagen Peace Research Institute* di tahun 1985. CS menantang pandangan keamanan tradisional dengan perpaduan antara pandangan realisme dengan konstruktivisme sosial (Otukoya, 2024). Dibawa dari pemahaman tokoh-tokoh seperti Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), mereka berpendapat bahwa keamanan merupakan suatu hal yang muncul dan terjalin dari adanya interaksi sosial dan keberlangsungan hidup, dimana melalui pemahaman tersebut, sebuah isu atau permasalahan terkait keamanan dapat dijelaskan sebagai sebuah ancaman eksistensial terhadap suatu objek yang dirujuk.

Menurut teori sekuritisasi, dalam membingkai suatu permasalahan atau isu, aktor yang akan mengangkat sebuah isu dari isu yang bukan keamanan menjadi sebuah isu keamanan harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap urgensi isu tersebut. Usaha untuk meyakinkan masyarakat tersebut dinamakan sebagai *speech act*, dimana dengan menuturkan suatu kata atau penjelasan, suatu hal sudah dilakukan untuk menamakan dan memberikan pemahaman terhadap suatu permasalahan atau isu (Buzan et al, 1998).

Dalam teori sekuritisasi, terdapat tiga spektrum yang menjelaskan proses bagaimana sebuah permasalahan atau isu dapat disekuritisasi, yang meliputi tahap non-politisasi, politisasi, dan sekuritisasi (Emmers, 2016). Dalam tahap non-politisasi, sebuah permasalahan atau isu belum sampai atau belum menjadi topik perbincangan di ranah pemerintahan dan tidak menjadi bagian dari perdebatan publik. Dalam tahap politisasi, permasalahan atau isu tersebut menjadi sebuah perbincangan di ranah pemerintahan dan mulai ditangani dalam sistem politik dan menjadi hal yang menuntut tindakan pemerintah. Di tahap sekuritisasi, aktor yang terkait pun melakukan *speech act* untuk meyakinkan masyarakat dan menjadikan permasalahan atau isu tersebut sebagai suatu ancaman yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera melalui upaya yang dinamakan sebagai tindakan darurat (Does, 2013). Dalam melakukan proses sekuritisasi sendiri, terdapat apa yang dinamakan sebagai objek referensi, yaitu pihak atau kelompok yang menjadi objek perlindungan dari sebuah permasalahan atau isu yang disekuritisasi.

Dalam mensekuritisasi para pengungsi dan pencari suaka di Australia, Scott Morrison dan Anthony Albanese berperan sebagai aktor sekuritisasi utama yang memberikan *speech act*, dimana melalui *speech act* kedua perdana menteri menyatakan adanya eksistensi ancaman yang dapat membahayakan pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut dan juga masyarakat Australia sebagai objek referensi. Eksistensi ancaman yang dikemukakan melalui *speech act* tersebut kemudian diterima oleh ranah publik sebagai isu yang perlu diatasi dan ditanggapi. Sebagai bentuk tindakan darurat, kedua perdana menteri kemudian menerapkan kebijakan perlindungan perbatasan dan juga kebijakan detensi pada pemrosesan lepas pantai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan data berupa informasi dan fakta yang dikumpulkan dari sumber data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dimana data yang dikumpulkan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian terdahulu dan dari berbagai sumber lain seperti artikel jurnal, buku literatur, dan sumber berita relevan yang diperoleh dari sumber internet yang akurat dan terpercaya, termasuk *website* resmi milik pemerintah Australia.

Data yang dicari dan diolah merupakan data berupa *speech act* dari pidato atau pernyataan yang diberikan oleh Scott Morrison dan Anthony Albanese dan juga dari aktor fungsional terkait, data berupa pernyataan dari tokoh publik atau masyarakat umum sebagai bentuk respon terhadap *speech act* yang diberikan, data statistik terkait jumlah pengungsi dan pencari suaka, dan data laporan terkait pelaksanaan dan penerapan kebijakan sebagai bentuk tindakan darurat.

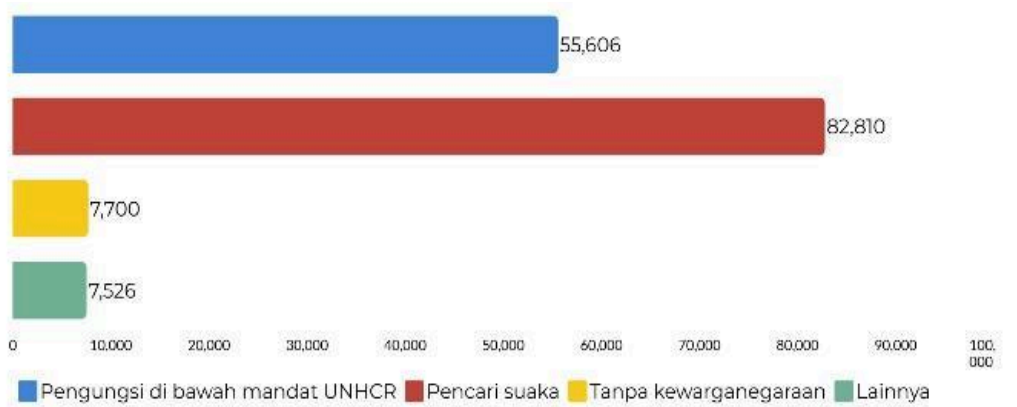
Dengan data-data yang ditemukan melalui berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai pelaksanaan sekuritisasi terhadap para pengungsi dan pencari suaka di Australia tahun 2021-2023, dimana data yang ada akan dipilah dan diolah berdasarkan relevansi dan akurasi dalam menjawab hasil penelitian secara kritis dengan menggunakan teori sekuritisasi untuk memahami tahap pelaksanaan sekuritisasi yang dilakukan oleh Scott Morrison dan Anthony Albanese.

PEMBAHASAN

Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Tahun 2021-2023

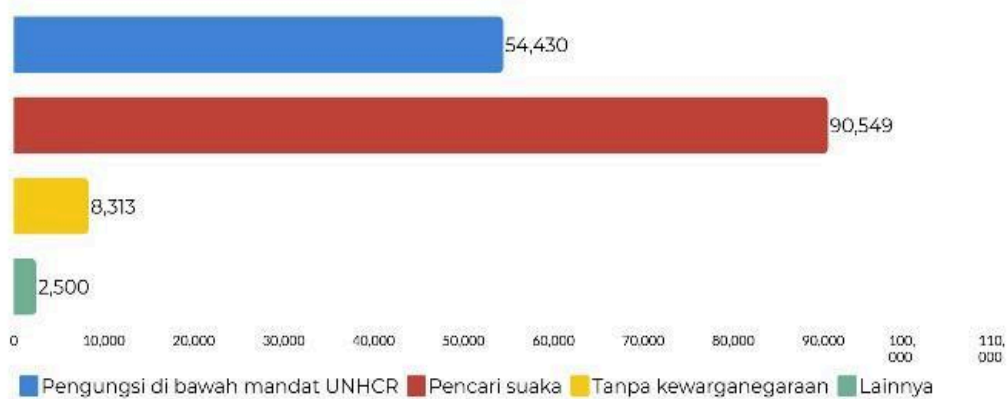
Berdasarkan data dari UNHCR *Refugee Statistics*, di tahun 2021, total jumlah pengungsi yang ada di Australia berada di angka 55.606 dan pencari suaka berada di angka 82.810 (lihat grafik 2.1). Di tahun 2022, jumlah tersebut kemudian meningkat untuk pencari suaka menjadi 90.549 dan untuk jumlah pengungsi sendiri mengalami penurunan walaupun tidak banyak menjadi 54.430 (lihat grafik 2.2). Di tahun 2023, terdapat penurunan yang cukup signifikan untuk jumlah pengungsi, yaitu menjadi sebanyak 34.502, dan untuk pencari suaka turun menjadi 82.625 (lihat grafik 2.3).

Grafik 1. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Tahun 2021



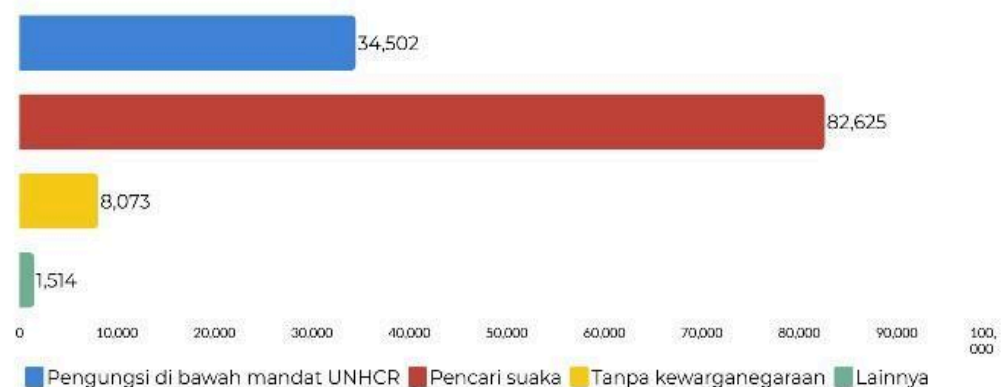
Sumber : UNHCR, 2023

Grafik 2. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Tahun 2022



Sumber : UNHCR, 2023

Grafik 3. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Tahun 2023



Sumber : UNHCR, 2023

Dari banyaknya pengungsi dan pencari suaka yang datang dan menetap di Australia, sebagian besar merupakan kelompok yang berusaha untuk menghindari konflik atau keadaan hidup yang buruk di negara asalnya. Negara asal para pengungsi dan pencari suaka yang datang dan menetap di Australia pun beragam, dimana sebagian besar merupakan kelompok yang berasal dari negara di Timur Tengah dan Asia. Dari Timur Tengah, kebanyakan pengungsi

datang dari negara Afghanistan dan Iran, dimana untuk pencari suaka banyak dari mereka yang datang dari negara Asia seperti Malaysia, China, dan India (UNHCR, 2023).

Para pengungsi yang datang dari negara-negara di Timur Tengah merupakan kelompok yang berusaha menghindari konflik dan perang yang terjadi di negaranya, sedangkan sebagian besar pencari suaka yang datang dari negara-negara di Asia berusaha untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik karena adanya kesenjangan ekonomi dan ketidakstabilan politik di negara asalnya. Namun, mereka yang berasal dari negara-negara rawan konflik seperti di Timur Tengah biasanya akan lebih mudah mendapatkan visa tinggal, dikarenakan keadaan hidup mereka yang terancam dirasa memiliki resiko ancaman terhadap keselamatan yang lebih tinggi, sehingga proses pemberian visanya cenderung lebih mudah disetujui (Refugee Council of Australia, 2024).

Dinamika Kebijakan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia

Penerapan kebijakan terkait pengungsi dan pencari suaka yang begitu keras dan restriktif di Australia merupakan bentuk sekuritisasi yang mulai diterapkan dari tahun 1980-an dan terus dikembangkan dan dirubah setiap tahunnya. Tindakan pencegahan yang diterapkan dalam berbagai kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai proses dan bentuk selama bertahun-tahun untuk menanggapi perubahan dan peningkatan arus kedatangan migrasi, terutama arus kedatangan para pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan yang diterapkan meliputi kebijakan pencegahan, pembatasan, dan kebijakan penempatan (Watkins, 2017).

Di tahun 2001, pada masa kampanye pemilihan umum federal, Perdana Menteri John Howard memberikan *speech act* terkait kedatangan pengungsi dan pencari suaka setelah peristiwa MV Tampa dengan mengatakan, “...*We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come.*” (“... Kami akan memutuskan siapa yang datang ke negara ini dan dalam kondisi apa mereka datang.”) (National Museum Australia, 2024). *Speech act* tersebut diterima oleh pemerintah Australia dengan diterapkannya kebijakan *Pacific Solution* di tahun 2001-2007 sebagai respon dari peristiwa MV Tampa dan menjadi kebijakan pelopor terkait pemrosesan lepas pantai dan pusat penahanan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang menggunakan kapal, sehingga membantu mencegah datangnya pengungsi dan pencari suaka melalui jalur laut dalam jumlah yang tinggi (Alunaza et al, 2018).

Setelah Kevin Rudd menggantikan Howard sebagai perdana menteri di tahun 2008, kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka kemudian menjadi lebih ringan. Dalam essay Rudd yang berjudul ‘*Faith in Politics*’, Rudd menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan harus didasari dengan ‘nilai keadilan, kesetaraan, dan belas kasih’, dimana Rudd juga mengomentari kebijakan *Pacific Solution* Howard sebagai penyebab kekhawatiran akan etis dan konsistensi moral Australia dalam mengimplementasikan kebijakan (Cooper, 2020).

Sebagai bentuk perubahannya, Rudd kemudian menghapus kebijakan *Pacific Solution* sehingga tidak lagi diberlakukannya kebijakan pemrosesan lepas pantai untuk para pengungsi dan pencari suaka. Para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pulau Nauru dan Pulau Manus pada saat itu kemudian ditempatkan kembali di sekitar wilayah Australia seperti di *Christmas Island* (Buchanan, 2024).

Memasuki pemerintahan Julia Gillard di tahun 2010, dalam *speech act*-nya setelah terpilih sebagai Perdana Menteri, Gillard mengatakan:

"Today I am announcing steps to strengthen Australia's border protection arrangements. ...We are taking these steps in response to the increase in unauthorised people movements in our region... I am also making the Government's policy goal clear: it is to wreck the people smuggling trade by removing the incentive for boats to leave their port of origin in the first place; to remove both the profitability of the trade and the danger of the voyage." (SBS News, 2013)

("Hari ini saya mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat pengaturan perlindungan perbatasan Australia. ...Kami mengambil langkah-langkah ini sebagai tanggapan atas meningkatnya pergerakan orang tanpa izin di wilayah kami... Saya juga memperjelas tujuan kebijakan Pemerintah: yaitu menghancurkan perdagangan penyelundupan manusia dengan menghilangkan insentif bagi kapal-kapal untuk meninggalkan pelabuhan asal mereka; untuk menghilangkan keuntungan dari perdagangan tersebut dan juga bahaya pelayaran.")

Dari *speech act*-nya tersebut Gillard mengindikasikan tujuannya untuk melindungi perbatasan Australia dari kedatangan imigran ilegal untuk menghindari ancaman keamanan berupa kegiatan penyelundupan manusia dan bahayanya melakukan perjalanan melalui jalur laut, sehingga kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut kembali ditegaskan. Penegasan kebijakan dilakukan dengan memberlakukan kembali kebijakan pemrosesan lepas pantai dan fasilitas penahanan di Pulau Manus dan Nauru, yang didukung oleh Partai Koalisi pada saat itu dengan menetapkan prinsip '*no document, no entry*'.

Di tahun 2013, sekuritisasi terhadap pengungsi dan pencari suaka dilanjutkan pada masa pemerintahan Tony Abbott, dimana sebagai *speech act*, Abbott mengatakan, *"One of the things that will happen very swiftly is that people who come here illegally by boat, even those who might ultimately be found to be refugees, will not get permanent residency of our country,"* ("Salah satu hal yang akan terjadi adalah orang-orang yang datang ke sini secara ilegal dengan perahu, bahkan mereka yang pada akhirnya ditemukan sebagai pengungsi, tidak akan mendapatkan izin tinggal permanen di negara kita,") (Laughland, 2013). Dari *speech act* tersebut, kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka sebagai bentuk perlindungan perbatasan diperkuat dengan ditetapkannya kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB).

Kebijakan OSB diperkenalkan sebagai instrumen untuk melindungi perbatasan Australia dari adanya kegiatan penyelundupan manusia dan untuk mencegah adanya individu atau kelompok yang membahayakan nyawanya di laut, dimana kebijakan tersebut menerapkan upaya memutar balikkan kapal-kapal yang berusaha datang membawa pengungsi dan pencari

suaka ke Australia dan menahan mereka yang berhasil datang di fasilitas detensi dan penahanan yang terletak di lepas pantai dan pulau sekitar wilayah Australia (Ibekwe, 2022).

Sekuritisasi Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Masa Pemerintahan Scott Morrison Tahun 2021 - 2022

Proses *Speech Act* Scott Morrison Tahun 2021-2022

Di tahun 2014, saat Morrison masih menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia, beliau menyampaikan pesan melalui video kepada para pencari suaka yang ditahan di fasilitas penahanan di Pulau Manus dan Pulau Nauru, dimana mereka datang ke Australia dengan menggunakan perahu melalui jalur laut. Dalam pesan video tersebut, Morrison memberikan peringatan kepada para pencari suaka tersebut untuk segera kembali ke negara asal, atau mereka akan ditempatkan di fasilitas penahanan dengan jangka waktu yang lama, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di Australia (Laughland, 2014):

"You have been brought to this place here because you have sought to illegally enter Australia by boat. The new Australian Government will not be putting up with those sorts of arrivals. ...If you choose not to go home, then you will spend a very, very long time here. And so I urge you to think carefully about that decision and make a decision to get on with the rest of your life." (Laughland, 2014)

("Anda dibawa ke tempat ini karena Anda berusaha memasuki Australia secara ilegal dengan perahu. Pemerintah Australia yang baru tidak akan menoleransi kedatangan semacam itu. ...Jika Anda memilih untuk tidak pulang, maka Anda akan menghabiskan waktu yang sangat, sangat lama di sini. Jadi saya mendesak Anda untuk mempertimbangkan keputusan itu dengan saksama dan membuat keputusan untuk melanjutkan hidup Anda.")

Pesan yang disampaikan dalam video tersebut menjadi *speech act* Morrison kepada para pengungsi dan pencari suaka yang telah memilih untuk datang ke Australia melalui jalur laut, dimana kedatangan individu atau kelompok melalui jalur tersebut dianggap ilegal menurut kebijakan Australia. Melalui pesannya tersebut, Morrison memutuskan bahwa dengan memerintahkan para pencari suaka yang telah datang untuk kembali ke negara asalnya merupakan keputusan yang lebih baik dan akan mampu melindungi dan menjaga keselamatan mereka:

"There are new rules in place under this new government, so I urge you to think carefully about your next decision, and to make a decision to get on with the rest of your life and to not remain here and take the option to go back to the country from which you've originally come. This is the policy of the new government." (Laughland, 2014).

("Ada peraturan baru yang berlaku di bawah pemerintahan baru ini, jadi saya mendesak Anda untuk berpikir hati-hati tentang keputusan Anda berikutnya, dan untuk membuat keputusan untuk melanjutkan hidup Anda dan tidak tinggal di sini dan mengambil pilihan untuk kembali ke negara asal Anda. Ini adalah kebijakan pemerintahan baru.")

Speech act yang diberikan oleh Morrison tersebut diterima oleh pemerintah Australia melalui bentuk dukungan dari Partai Koalisi di bawah pemerintahan Tony Abbott, dimana Koalisi

menawarkan insentif moneter dengan jumlah mencapai AUD \$10.000 bagi para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan di Pulau Manus dan Pulau Nauru agar bersedia untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela (Whyte, 2014). Melalui pemberian insentif tersebut, diketahui bahwa semenjak bulan September 2013, sebanyak 283 pengungsi dan pencari suaka secara sukarela telah bersedia untuk kembali ke negara asal mereka (Whyte, 2014).

Setelah menjabat sebagai perdana menteri di tahun 2018, Morrison terus menekankan akan pentingnya menerapkan kebijakan yang tidak memperbolehkan kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dengan menggunakan perahu melalui jalur laut. Pada masa kampanye pemilu di tahun 2022, melalui kunjungannya ke kota Perth, Morrison menjadikan kebijakan pencari suaka sebagai salah satu urgensi utama yang ingin dibawa. Dalam salah satu pidatonya di kampanye tersebut, Morrison mengatakan, *"In August of 2008, Kevin Rudd abolished temporary protection visas. That was the green light to Labor's border protection failures. You want to date it - that was the day,"* ("Pada bulan Agustus 2008, Kevin Rudd menghapuskan visa perlindungan sementara. Itu adalah lampu hijau bagi kegagalan perlindungan perbatasan Partai Buruh. Anda ingin menentukan tanggalnya - itulah harinya,") (Stayner, 2022).

Melalui pernyataan tersebut, Morrison mengkritik rencana Partai Buruh yang bertujuan untuk menentang penerapan visa perlindungan sementara. Kebijakan visa perlindungan sementara sendiri diterapkan untuk menolak pemukiman kembali para pengungsi dan pencari suaka secara permanen di Australia, dan Partai Buruh menganggap kebijakan visa sementara tersebut sebagai proses yang mahal dan sangat tidak diperlukan (Stayner, 2022). Morrison mengatakan bahwa dengan menolak penerapan visa sementara, berarti Partai Buruh belum mempelajari apapun terkait perlindungan perbatasan dan belum bisa menerapkan kebijakan yang tepat terkait kepentingan keamanan perbatasan Australia.

Sebelumnya di tahun 2019, melalui pidatonya dalam kampanye yang dilaksanakan di Sydney, Morrison memutuskan untuk membekukan penerimaan program kemanusiaan bersama dengan Partai Koalisinya dimana beliau mengatakan, *"Australia isn't just about growing our population – it's about quality of life. We're capping and freezing our immigration growth so our government's record A\$100 billion congestion busting program for roads and rail can catch up and take the pressure off our cities."* ("Australia tidak hanya soal pertumbuhan populasi – tetapi juga soal kualitas hidup. Kami membatasi dan membekukan pertumbuhan imigrasi sehingga program pemerintah senilai A\$100 miliar digunakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas jalan dan rel kereta api dapat mengejar ketertinggalan dan mengurangi beban kota-kota kami.") (Grattan, 2019).

Speech act Morrison untuk membekukan penerimaan imigran di Australia diberikan untuk memastikan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Australia tetap terjamin, dan di saat bersamaan juga diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan terkait pengungsi dan pencari

suaka di Australia menjadi hal yang lebih terkendali. Penerimaan terhadap *speech act* Morrison tersebut diwujudkan melalui pemerintahan koalisi Morrison yang turut meningkatkan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang dapat menetap di Australia dari 30% menjadi 40% di tahun 2019, dimana walaupun ditingkatkan, ditegaskan kembali bahwa dalam peningkatan tersebut Morrison dan pemerintahannya akan tetap mengontrol dan memilah imigran yang dapat menetap berdasarkan asal negara dan cara mereka datang dan keterampilan apa yang dapat mereka bawa dan terapkan di kota-kota yang nantinya akan menjadi tempat mereka menetap (Greene, 2019).

Pernyataan-pernyataan yang diberikan Morrison melalui berbagai pidato dan pesan tersebut diterima dan diwujudkan oleh rekan salah satu aktor dalam pemerintahan Partai Koalisi yang dapat dilihat melalui peran dan kontribusi Karen Andrews sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Scott Morrison, yang kemudian menjadi aktor fungsional dalam proses sekuritisasi terhadap pengungsi dan pencari suaka. Sebagai aktor fungsional, Andrews bersama dengan Presiden Aingimea dari Pulau Nauru kemudian menandatangani nota kesepahaman untuk membangun dan menyepakati pemrosesan regional bagi para pengungsi dan pencari suaka Australia yang ditempatkan di Pulau Nauru untuk diproses.

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani di tahun 2021, Andrews berkomitmen untuk mempertahankan penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) agar dapat menjaga perbatasan Australia dari kedatangan pengungsi dan pencari suaka melalui jalur laut dan mempertahankan fasilitas penahanan bagi pengungsi dan pencari suaka Australia di negara ketiga Pulau Nauru. Setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut Andrews berkata, “*Anyone who attempts an illegal maritime journey to Australia will be turned back or taken to Nauru for processing. They will never settle in Australia.*” (“Siapa pun yang mencoba melakukan perjalanan laut ilegal ke Australia akan ditolak, atau dibawa ke Nauru untuk diproses. Mereka tidak akan pernah menetap di Australia.”) (Minister for Home Affairs, 2021).

Eksistensi Ancaman Keamanan dalam Proses Sekuritisasi Scott Morrison Tahun 2021-2022 dan Proteksi Objek Referensi

Menurut data yang diberikan oleh *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA), di tahun 2021-2023 AFMA telah berhasil mencegah kedatangan 502 kapal asing ilegal (Bardon, 2025), dimana menurut data dari *Refugee Council of Australia* di tahun 2021-2023, diketahui bahwa sebanyak 11 kapal tersebut merupakan kapal yang datang membawa pengungsi dan pencari suaka ke Australia, dimana sekitar 273 pengungsi dan pencari suaka dibawa oleh kapal tersebut (Refugee Council of Australia, 2024).

Kembali meningkatnya kedatangan para pengungsi dan pencari suaka ke Australia yang menggunakan jalur laut kemudian menaikkan isu tersebut dan dipolitisasi menjadi isu keamanan oleh pemerintah Australia. Menurut pemerintah Australia, isu keamanan terkait

kedatangan pengungsi dan pencari suaka menjadi ancaman keamanan tidak hanya bagi masyarakat dan keamanan nasional Australia, namun juga menjadi ancaman bagi para pengungsi dan pencari suaka sendiri. Bagi para pengungsi dan pencari suaka, kedatangan mereka melalui jalur laut menimbulkan ancaman keamanan dari rawan terjadinya kecelakaan seperti tenggelamnya perahu yang mereka gunakan sebagai mode transportasi untuk mencapai Australia. Menurut data yang disediakan oleh *International Organization for Migration* (IOM) sendiri, 57% penyebab kematian imigran disebabkan karena peristiwa tenggelam (Migration Data Portal, 2024).

Pada masa pemerintahan Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri, dimana Rudd kemudian menghapus salah satu kebijakan yang diterapkan oleh John Howard sebelumnya, yaitu *Pacific Solution*, kebijakan terkait para pengungsi dan pencari suaka menjadi tidak begitu restriktif. Namun, meringannya kebijakan yang diterapkan oleh Rudd kemudian menyebabkan lebih dari 51.000 kedatangan maritim ilegal di perairan Australia, dimana diperkirakan sekitar 1.200 pencari suaka dari kedatangan ilegal tersebut tewas di laut (Kenny, 2015). Karena hal tersebut, setelah pemerintahan Rudd berakhir, kebijakan yang diterapkan terkait kedatangan pengungsi dan pencari suaka melalui jalur laut kemudian kembali diketatkan sampai akhirnya diterapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OBS) pertama kali di tahun 2013 pada masa pemerintahan Tony Abbott.

Berdasarkan *speech act* yang diberikan Morrison di tahun 2014 kepada para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan di Pulau Manus dan Nauru, *speech act* tersebut diberikan dengan tujuan untuk melindungi para pengungsi dan pencari suaka dari terjadinya ancaman tenggelam di laut, menjadikan pengungsi dan pencari suaka sebagai salah satu objek referensi yang dilindungi melalui sekuritisasi yang dilakukan oleh Scott Morrison.

Respon Publik Terhadap Proses Sekuritisasi Scott Morrison Tahun 2021-2022

Melalui berbagai *speech act* yang diberikan Morrison, pernyataan-pernyataan yang diberikannya mengimplikasikan keinginan Morrison untuk mencegah kedatangan pengungsi dan pencari suaka secara ilegal melalui jalur laut dan juga secara implisit menegaskan bahwa mereka yang datang melalui jalur ilegal tersebut tidak akan ditempatkan di Australia. Adanya implikasi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor dalam pengkonstruksian narasi negatif di media-media Australia terkait kedatangan para pengungsi dan pencari suaka, terutama mereka yang datang melalui jalur laut.

Dalam perkembangannya, salah satu isu yang masih sering dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Australia adalah diskriminasi. Perlakuan diskriminasi ini sendiri muncul karena adanya narasi yang dikonstruksi oleh media Australia tersebut yang menggambarkan para pengungsi dan pencari suaka sebagai ancaman karena “ketidakcocokan” mereka dengan masyarakat Australia (Haw, 2023). Bentuk narasi negatif terhadap pengungsi

dan pencari suaka yang cenderung diinformasikan melalui berbagai bentuk media di Australia dapat dilihat melalui salah satu penelitian yang dilakukan oleh jurnalis David Eades terkait liputan surat kabar yang berkontribusi dalam membentuk narasi terhadap kedatangan para imigran terutama mereka yang tergolong sebagai pengungsi dan pencari suaka. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa media surat kabar seperti *The Australian*, dari berbagai artikel mereka yang meliput mengenai kedatangan pengungsi dan pencari suaka, sebanyak 55% artikel yang diproduksi membentuk narasi negatif mengenai kedatangan para pengungsi dan pencari suaka di Australia (Are, 2019). Narasi negatif yang dibentuk melalui artikel tersebut antara lain meliputi proyeksi bahwa para pengungsi dan pencari suaka dapat membawa ancaman sosial, dimana narasi tersebut ditemukan dalam kurang lebih 125 artikel yang diproduksi oleh berbagai media surat kabar, salah satunya oleh *The Australian* (Are, 2019).

Selain itu, media seperti *The Australian* dan *News Corp* juga memproduksi masing-masing sebanyak 13 dan 54 artikel yang meliput narasi bahwa para pengungsi dan pencari suaka merupakan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat Australia yang membayar pajak (Are, 2019). Pauline Hanson, selaku pendiri dan pemimpin partai politik *One Nation* yang ditemukan di tahun 1997 sendiri memiliki relasi erat dengan media *News Corp*, dimana menjadi salah satu bukti penting terkait adanya hubungan partisan antara politik dan media dalam membingkai narasi terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia. Sebagai media yang memiliki sebagian besar lanskap media Australia, *News Corp* menjadi dikenal karena kecenderungannya dalam membingkai berita secara berlebihan dan berpartisipasi dalam lobi politik Australia, terutama dalam menggambarkan para pengungsi dan pencari suaka secara negatif (Lidberg, 2019).

Dalam perkembangannya, sikap dan persepsi masyarakat Australia yang cenderung negatif terhadap pendatang di negara Australia, khususnya terhadap para pengungsi dan pencari suaka, juga disebabkan karena beberapa aspek lain. Di tahun 1990-an, sikap dan persepsi negatif terbentuk karena adanya kekhawatiran bahwa Australia akan mengalami “Asianisasi”, dimana hal itu dinyatakan oleh Pauline Hanson dalam pidato parlemen perdananya yang mengklaim bahwa Australia berada dalam bahaya karena “dibanjiri” kedatangan orang dari Asia (Leroy, 2023).

Penerapan Kebijakan dalam Proses Sekuritisasi Scott Morrison Tahun 2021-2022

Dalam *speech act*-nya, Morrison merujuk para pengungsi dan pencari suaka serta masyarakat Australia sebagai objek referensi yang ingin dilindungi dalam pelaksanaan sekuritisasi. Sebagai bentuk proteksi, Morrison kemudian menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang memiliki “*zero tolerance policy*” terhadap kedatangan para pengungsi dan pencari suaka ke Australia melalui jalur laut. Selama masa jabatan Morrison dari

tahun 2021-2022, melalui OSB, sebanyak kurang lebih 10 pengungsi dan pencari suaka telah dikembalikan secara paksa ke negara asal mereka (Operations Sovereign Borders, 2022).

Di bulan Mei 2022, OSB berhasil mencegah kapal yang diduga membawa “imigran ilegal” dari Sri Lanka. Pelaksanaan operasi pencegahan kapal tersebut diumumkan oleh Laksamana Muda Justin Jones selaku Komandan OSB pada hari pemilu, dimana di saat bersamaan juga dikonfirmasi oleh Morrison dalam pernyataannya di hari yang sama (Greene, 2022). Diketahui bahwa keputusan untuk mengumumkan pelaksanaan operasi tersebut ke publik berasal dari amanah Morrison sendiri, dimana dianggap kontroversial karena adanya kekhawatiran keputusan tersebut akan melanggar pelaksanaan pemilu dan mempolitisasi layanan dan pandangan publik.

Selain melalui pemulangan secara paksa dan operasi pencegahan kapal oleh OSB, pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia melalui jalur laut ditempatkan ke dalam pusat penahanan, yaitu di pusat penahanan tertutup yang tidak memperbolehkan orang yang ditempatkan di dalamnya untuk pergi dan di pusat penahanan berbasis komunitas. Pusat penahanan tertutup sendiri dirancang secara khusus untuk menjadi tempat penahanan, seperti Pusat Penahanan Imigrasi (IDC), Akomodasi Transit Imigrasi (ITA), dan tempat penahanan alternatif tertutup berupa hotel, rumah sakit, dan panti jompo. Berdasarkan data akhir di bulan Desember 2021, sebanyak 1.489 pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di pusat penahanan tertutup, dan di akhir bulan Mei 2022 sebanyak 1.402 pengungsi dan pencari suaka masih ditempatkan di dalam pusat penahanan tertutup tersebut (Refugee Council of Australia, 2024).

Pada masa pemerintahan Morrison, pemberian visa perlindungan sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut diterapkan untuk melarang siapapun tanpa visa yang sah memasuki Australia dan juga diterapkan untuk memperlambat proses klaim permanen para pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Selama masa pemerintahannya Morrison mengindikasikan bahwa visa perlindungan sementara merupakan hal yang perlu dipertahankan. Di tahun 2021-2022, sebanyak 298 visa perlindungan sementara telah diberikan (Refugee Council of Australia, 2024). Semenjak penerapan visa perlindungan sementara tersebut, sekitar 18.000 pengungsi dan pencari suaka di tahun 2022 yang menjadi pemegang visa pun harus hidup dalam keadaan yang tidak pasti (Stayner, 2022).

Sekuritisasi Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Masa Pemerintahan Anthony Albanese Tahun 2022-2023

Proses *Speech Act* Anthony Albanese Tahun 2022-2023

Pada bulan April 2022, melalui konferensi pers di Brisbane, Albanese menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendukung dan meneruskan penerapan OSB dan pemrosesan lepas pantai. Albanese berkata, “*We’ve said that we support Operation Sovereign*

Borders. We've said we support the offshore processing system. We've said we support boat turnbacks." ("Kami telah menyatakan bahwa kami mendukung *Operation Sovereign Borders*. Kami telah menyatakan bahwa kami mendukung sistem pemrosesan lepas pantai. Kami telah menyatakan bahwa kami mendukung proses pemutarbalikan kapal.") (Sky News Australia, 2022). Pernyataan tersebut kemudian juga kembali ditegaskan melalui konferensi pers yang dilakukan di Melbourne pada bulan Juni 2022, dimana Albanese berkata, "*People arriving by boat will not be settled here. Very clearly, our system is in place of Operation Sovereign Borders,*" ("Orang-orang yang datang dengan perahu tidak akan ditempatkan di sini. Jelas sekali, sistem kami menerapkan *Operation Sovereign Borders,*") (Sajid, 2022).

Dalam berbagai pernyataan yang diberikan Albanese sebagai bentuk *speech act*-nya, Menteri Dalam Negeri bayangan Australia pada saat itu, yaitu Kristina Keneally, yang merupakan bagian dari Partai Buruh turut mendukung pernyataan Albanese yang membahas kebijakan OSB melalui pernyataannya pada konferensi pers di bulan April 2022 dimana Keneally berkata, "*No one who has attempted to come by boat since the operation of Sovereign Borders will be allowed to settle in Australia,*". ("Tidak seorang pun yang mencoba datang dengan perahu sejak *Operation Sovereign Borders* akan diizinkan untuk menetap di Australia,") (Karp, 2022). Melalui penerimaannya terhadap *speech act* Albanese tersebut, Keneally berperan sebagai aktor fungsional yang turut mendukung pelaksanaan sekuritisasi Albanese.

Keneally mengatakan bahwa setelah diterapkannya OSB, pemberian visa perlindungan sementara tidak lagi diperlukan karena melalui OSB pencegahan dan penanganan terhadap masuknya pengungsi dan pencari suaka melalui jalur laut sudah dapat ditangani dengan baik selama ini. Pernyataan mengenai OSB tersebut dijelaskan oleh Keneally melalui wawancara dengan *Sky News Australia* pada April 2022, dimana Keneally berkata, "*Since Operation Sovereign Borders was introduced, nobody goes on TPV (Temporary Protection Visa). If you attempt to come to Australia by boat, you will be turned back or you will be sent to Nauru.*" ("Sejak *Operation Sovereign Borders* diperkenalkan, tidak ada seorang pun yang menggunakan TPV (*Temporary Protection Visa*). Jika Anda mencoba datang ke Australia dengan perahu, Anda akan ditolak atau akan dikirim ke Nauru.") (Sky News Australia, 2022).

Eksistensi Ancaman Keamanan dalam Proses Sekuritisasi Anthony Albanese Tahun 2022-2023 dan Proteksi Objek Referensi

Sebagai langkah awal Albanese dalam mensekuritisasi kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut, melalui *speech act*-nya, Albanese menyatakan akan menjaga perbatasan keamanan perbatasan Australia dengan terus menerapkan kebijakan OSB. Berdasarkan *speech act* tersebut, pelaksanaan sekuritisasi terhadap kedatangan para pengungsi dan pencari suaka secara ilegal didasari atas motivasi yang sama pada masa pemerintahan Morrison, yaitu salah satunya untuk melindungi para

pengungsi dan pencari suaka yang datang secara ilegal dari adanya ancaman keamanan selama perjalanan di laut saat mereka memutuskan untuk datang ke Australia dengan menggunakan transportasi perahu.

Adanya eksistensi ancaman bagi para pengungsi dan pencari suaka tersebut juga didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri bayangan Australia tahun 2023, Yvette Cooper, yang menyatakan bahwa diperlukannya tindakan segera untuk menghentikan “penyeberangan perahu berbahaya” yang dapat membahayakan nyawa dan mengancam keamanan perbatasan, dimana pernyataan tersebut diberikan oleh Cooper sebagai bentuk kata-kata penutup dalam pelaksanaan pungut suara untuk mengesahkan *Illegal Immigration Bill* yang diadakan pada bulan Maret 2023 (Ambrose & Sparrow, 2023).

Selain adanya eksistensi ancaman terhadap pengungsi dan pencari suaka, pelaksanaan sekuritisasi, baik pada masa pemerintahan Morrison maupun pada masa pemerintahan Albanese, dilakukan karena adanya persepsi dominan yang sudah ada di Australia dari dimulai arus kedatangan imigran di tahun 1980, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan nasional Australia akibat kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang melalui jalur laut, dimana mereka dianggap sebagai pengungsi dan pencari suaka “palsu” yang berusaha masuk melalui jalur “mudah” ke Australia untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata (Loughnan, 2019).

Pada masa pemerintahan Albanese, kedatangan pengungsi dan pencari suaka melalui jalur ilegal ke Australia juga menimbulkan adanya ketakutan akan ancaman *biosecurity*. Ancaman *biosecurity* muncul setelah kedatangan sekitar 40 pencari suaka secara ilegal di dekat pangkalan udara Mungallalu-Truscott, wilayah Kimberley, kawasan barat Australia. Pemimpin daerah timur Kimberley, David Menzel, mengutarakan kekhawatirannya akan adanya ancaman *biosecurity* yang kemungkinan dibawa oleh para pencari suaka dari negara yang tidak dikenal melalui penggunaan transportasi kapal melewati jalur ilegal tersebut (Maloney & Deves, 2024).

Respon Publik Terhadap Proses Sekuritisasi Anthony Albanese Tahun 2022-2023

Speech act Albanese yang menegaskan diteruskannya pelaksanaan kebijakan *Operations Sovereign Borders* (OSB) mengindikasikan keinginan Albanese untuk mengamankan perbatasan Australia dari adanya ancaman keamanan yang dibawa oleh pengungsi dan pencari suaka yang datang secara ilegal. Adanya persepsi pengungsi dan pencari suaka sebagai ancaman keamanan tersebut kemudian turut mempengaruhi persepsi publik terhadap kehadiran para pengungsi dan pencari suaka menjadi cenderung ke arah yang lebih negatif.

Sikap dan persepsi masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka dipengaruhi oleh ideologi dan karakteristik masing-masing individu dalam masyarakat sendiri.

Masyarakat Australia yang memiliki keyakinan politik yang konservatif dan otoriter kemudian cenderung akan bersikap tidak ramah terhadap para pengungsi dan pencari suaka karena memegang ideologi orientasi dominasi sosial, mengikuti persepsi yang dikonstruksi pemerintah Australia terhadap pengungsi dan pencari, sehingga mereka melihat kehidupan sosial sebagai perjuangan hidup yang kompetitif, memunculkan anggapan bahwa hierarki sosial mereka dengan para pengungsi dan pencari suaka tidaklah setara (Haslam & Holland, 2012). Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor para pengungsi dan pencari suaka masih mendapatkan perilaku yang diskriminatif dari sebagian masyarakat Australia.

Perlakuan diskriminasi terhadap pengungsi dan pencari suaka tersebut sudah dibuktikan melalui survei yang dilakukan di tahun 2020, dimana dari 423 pengungsi dan pencari suaka yang mengikuti survei, sebanyak 91 individu (22%) menyatakan bahwa mereka telah mengalami diskriminasi semenjak menetap di Australia (Ziersch et al, 2020). Dalam lingkungan kerja atau dalam keadaan hidup sehari-hari seperti di tempat atau transportasi umum, seringkali masyarakat Australia memberikan perlakuan “tidak ramah” dan cenderung mengabaikan keberadaan para individu tersebut. Anak perempuan dari salah satu peserta survei bernama Naeva, yang merupakan wanita Muslim dari Afrika, menjelaskan pengalaman diskriminasi yang dialaminya, *“There was a lady that was just walking past. Like I don't know if she was having a bad day or anything, but then she saw black people plus Muslim people and she just started going off and off at us for no reason...I was so shocked.”* (Ada seorang wanita yang lewat. Entah apakah dia sedang mengalami hari yang buruk atau apa, tapi dia melihat orang kulit hitam dan Muslim, dan dia mulai mengomel pada kami tanpa alasan...Saya sangat terkejut.) (Ziersch et al, 2020).

Namun, walaupun terdapat beberapa masyarakat Australia yang masih memiliki sikap negatif dan tidak ramah terhadap para pengungsi dan pencari suaka di Australia, banyak juga masyarakat yang memiliki persepsi dan sikap yang positif dan berpikiran terbuka. Di Australia, terdapat salah satu kelompok advokasi pengungsi dan pencari suaka bernama *Rural Australians for Refugees* (RAR). RAR merupakan kelompok advokasi yang dibentuk di tahun 2001 setelah terjadinya peristiwa MV Tampa oleh para perempuan di daerah *Southern Highlands*. Sebagai kelompok advokasi pengungsi dan pencari suaka, RAR bertujuan untuk mendorong dilakukannya perubahan terhadap kebijakan pemerintah Australia terkait pengungsi dan pencari suaka yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Australia, yaitu keadilan, kehormatan, dan kesopanan. Setiap tahunnya, RAR mewujudkan aksi dan program mereka dalam membela hak pengungsi dan pencari suaka melalui penulisan dan pengiriman surat kepada para politisi serta media lokal dan nasional, pengadaan aksi unjuk rasa dan kampanye, dan dengan memulai dan mempromosikan petisi.

Selain melalui aksi kelompok advokasi, sikap dan persepsi positif masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Australia kemudian juga ditunjukkan melalui sebuah

studi global yang dilakukan di tahun 2022 di 28 negara oleh Ipsos, salah satu perusahaan riset pasar dan opini publik global. Berdasarkan studi tersebut, reaksi dan persepsi masyarakat Australia terus diketahui bertambah positif terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Menurut studi global Ipsos, sebanyak 83% masyarakat Australia setuju bahwa kelompok pengungsi dan pencari suaka harus dapat atau diperbolehkan untuk mencari perlindungan di negara Australia. Selain itu, sebanyak 63% masyarakat Australia tidak menyetujui jika Australia memutuskan untuk menutup perbatasannya dan menolak untuk menerima pengungsi dan pencari suaka, menunjukkan perubahan reaksi yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana sebelumnya sebanyak 54% masyarakat menyetujui sentimen tersebut (Ipsos, 2022).

Terkait dengan kekhawatiran pemerintah Australia mengenai pengungsi dan pencari suaka yang dirasa tidak dapat membaur ke dalam kehidupan masyarakat umum, sebanyak 59% masyarakat Australia percaya bahwa para pengungsi dan pencari suaka yang datang dan tinggal akan berhasil berintegrasi dengan masyarakat umum, dan sebanyak 68% percaya bahwa pengungsi dan pencari suaka akan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara Australia sendiri (Ipsos, 2022).

Penerapan Kebijakan dalam Proses Sekuritisasi Anthony Albanese Tahun 2022-2023

Berdasarkan *speech act* yang diberikan oleh Albanese dan juga Keneally, tindakan sekuritisasi dilakukan untuk melindungi masyarakat Australia dan juga para pengungsi dan pencari suaka sendiri yang dirujuk sebagai objek referensi. *Speech act* yang diberikan bertujuan untuk membawa perhatian masyarakat Australia bahwa Australia tidak akan memperbolehkan kedatangan imigran yang tergolong sebagai pengungsi dan pencari suaka yang datang untuk memasuki Australia melalui jalur laut, dimana hal tersebut bertujuan untuk terus menjaga kesejahteraan negara dan masyarakat Australia sendiri. Sebagai objek referensi, proteksi terhadap pengungsi dan pencari suaka oleh Albanese kemudian dilakukan dengan menghilangkan penggunaan visa perlindungan sementara dan juga dengan meneruskan penerapan kebijakan OSB.

Dengan dihilangkannya visa perlindungan sementara, sekitar 19.000 pengungsi dan pencari suaka yang sudah berada di bawah visa perlindungan sementara di Australia selama kurang lebih satu dekade kemudian dapat diberikan izin tinggal permanen di Australia (Barrett & Massola, 2023). Namun, izin tersebut hanya dapat diaplikasikan kepada para pengungsi dan pencari suaka yang sudah berada di Australia sebelum penerapan OSB di tahun 2013, dan pemerintahan Albanese tetap menegaskan bahwa kebijakan memutarbalikkan atau memulangkan perahu melalui OSB akan tetap terus diterapkan dengan tegas walaupun visa perlindungan sementara sudah dihapuskan. Dari 19.000 pengungsi dan pencari suaka yang kemudian mendapatkan izin tinggal permanen tersebut, sebagian besar berasal dari

negara-negara seperti Irak, Iran, Myanmar, Sri Lanka, dan Afghanistan (Barrett & Massola, 2023).

Dalam pelaksanaan sekuritisasi, Albanese masih menerapkan kebijakan yang sama dengan Morrison terkait kedatangan pengungsi dan pencari suaka melalui jalur laut, yaitu dengan mencegat dan memulangkan kembali perahu yang datang melalui penerapan OSB. Di sembilan bulan pertama setelah pemilu, pemerintahan Albanese telah berhasil memutarbalikkan dan memulangkan perahu yang membawa pencari suaka sebanyak tujuh kali, dimana diketahui bahwa terhitung sekitar 200 pencari suaka yang telah berusaha untuk memasuki Australia melalui jalur laut semenjak terpilihnya Albanese sebagai perdana menteri (Karp, 2023). Salah satu perahu yang dicegat dan diputarbalikkan merupakan perahu dari Sri Lanka yang tiba pada saat pelaksanaan pemilu. Pada bulan Agustus 2022, sebanyak 46 pengungsi dan pencari suaka laki-laki dipulangkan, dan sebanyak 16 individu dipulangkan di bulan Desember 2022 (Karp, 2023).

Berdasarkan data yang diberikan oleh *Australian Border Force* terkait laporan bulanan OSB, dari bulan Juni - Desember 2022, OSB berhasil mencegat dan memutarbalikkan 4 kapal yang membawa 125 pengungsi dan pencari suaka dari Sri Lanka. Di rentang bulan yang sama, OSB juga memindahkan kurang lebih 67 pengungsi dan pencari suaka ke negara tiga, dimana sebanyak kurang lebih 31 individu dipindahkan dari Pulau Nauru (Australian Border Force, 2025). Dari bulan Januari - Desember 2023, OSB berhasil mencegat dan memutarbalikkan dua kapal yang masuk ke wilayah perairan Australia yang membawa 21 pengungsi dan pencari suaka, dan juga memulangkan sebanyak 41 pengungsi dan pencari suaka dari kapal yang berasal dari Sri Lanka. OSB kemudian juga memindahkan sebanyak kurang lebih 159 pengungsi dan pencari suaka ke negara ketiga dimana sebanyak kurang lebih 15 individu dipindahkan dari Pulau Nauru (Australian Border Force, 2025).

KESIMPULAN

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Australia memiliki tanggung jawab untuk membukakan pintunya bagi para pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan perlindungan. Namun, dalam kenyataannya, tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan Australia tidak dijalankan sesuai dengan prinsip *non-refoulment* yang diterapkan dalam Konvensi Pengungsi, dimana kemudian Australia mensekuritisasi kedatangan pengungsi dan pencari suaka dengan pemberian *speech act* oleh perdana menteri yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat Australia akan adanya ancaman terhadap keamanan dari kedatangan para pengungsi dan pencari suaka sehingga akhirnya menerapkan kebijakan yang tegas dan restriktif sebagai bentuk *emergency measures*.

Sekuritisasi oleh Australia dilakukan untuk mencegah banyak masuknya imigran ilegal yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional Australia, salah

satunya dari ancaman kegiatan penyelundupan manusia atau *human trafficking* yang berkelanjutan. Dari banyaknya kedatangan imigran melalui jalur laut yang dilabelkan sebagai pengungsi dan pencari suaka, jika tidak disortir dan ditangani, hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi para aktor penyelundup untuk terus melakukan kegiatan kriminalnya dan juga menyebabkan kesulitan bagi para imigran yang memang benar datang sebagai pengungsi atau pencari suaka untuk mencari perlindungan. Kebijakan dan program yang diterapkan terhadap imigran yang datang melalui jalur laut menjadi bentuk *necessary evil* yang harus dilaksanakan oleh Australia. Walaupun sebagai bentuk *necessary evil*, diharapkan juga dalam perkembangannya kebijakan tersebut dapat mengakomodir para imigran yang benar datang ke Australia sebagai pengungsi dan pencari suaka dengan lebih baik dan tegas.

REFERENSI

- Alunaza, H., Maulana, I., & Sudagung, A. D. (2018). The Pacific Solution as Australia Policy Towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 14(1), 61-75. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2789.61-75>
- Ambrose, T. & Sparrow, A. (2023). "Labour's Attempt to Block Illegal Migration Bill Defeated in Commons-As It Happened". The Guardian. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.theguardian.com/politics/live/2023/mar/13/rishi-sunak-defence-spen ding-uk-us-australia-aukus-summit-joe-biden-anthony-albanese-keir-starmer-uk-politics-live>
- Are, C. (2019). "Is Australia's Print Media Supporting a Moral Panic About Migrants?". Humanitarian News Research Network. Retrieved April 3, 2025, from <https://blogs.city.ac.uk/humnews/2019/07/23/is-australias-print-media-supporting -a-moral-panic-about-migrants/>
- Australian Border Force. (2025). "Australian Border Force Newsroom". Australian Border Force. Retrieved January 21, 2025, from <https://www.abf.gov.au/sitenewsroom>
- Australian Council of Trade Unions. (2021). "Asylum Seekers and Refugees – A Rights Based Approach". Australian Council of Trade Unions. Retrieved June 2, 2024, from <https://www.actu.org.au/wp-content/uploads/2023/07/asylum-seekers-and-refuge es-a-rights-based-approach-2021.pdf>
- Azmi, A. N., & Dirgantara H, F. (2023). Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 4(1), 40-51. <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33364>
- Barrett, C., & Massola, J. (2023). "It is Impossible': Refugees Say Visa Change Won't Drive Them onto Boats". The Sydney Morning Herald. Retrieved February 3, 2025, from <https://www.smh.com.au/politics/federal/it-is-impossible-refugees-say-visa-chan ge-won-t-drive-them-onto-boats-20230216-p5cl6g.html>

- Buchanan, K. (2024). *Australia: Offshore Processing of Asylum Seekers*. Law Library: Library of Congress. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llgldr/2024555200/2024555200.pdf>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Does, A. (2013). "Securitization Theory". In *The Construction of the Maras: Between Politicization and Securitization*. Graduate Institute Publications.
- Emmers, R. (2016). "Securitization". In *Contemporary Security Studies (Fourth Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Eroukhmanoff, C. (2018). "Securitisation Theory: An Introduction". In *International Relations Theory* (pp. 1-4). E-International Relations.
- Grattan, M. (2019). "Morrison Brings Immigration Centre Stage with Freeze on Refugee Intake". *The Conversation*. Retrieved January 16, 2025, from <https://theconversation.com/morrison-brings-immigration-centre-stage-with-freeze-on-refugee-intake-116129>
- Greene, A. (2019). "Scott Morrison Announces Liberal Election Promise to Cap Australia's Annual Refugee Intake". ABC News. Retrieved February 11, 2025, from <https://www.abc.net.au/news/2019-04-28/coalition-election-pledge-to-cap-australia-annual-refugee-intake/11051932>
- Greene, A. (2022). "Scott Morrison Instructed Border Force to Reveal Election Day Asylum Boat Arrival". ABC News. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.abc.net.au/news/2022-05-27/scott-morrison-instructed-border-force-election-day-boat/101101464>
- Haslam, N. & Holland, E. (2012). "Attitudes Towards Asylum Seekers: The Australian Experience". In D. Bretherton & N. Balvin (Eds.), *Peace Psychology in Australia* (pp. 107-120). New York: Springer.
- Haw, A. L. (2023). "Hapless Victims" or "Making Trouble": Audience Responses to Stereotypical Representations of Asylum Seekers in Australian News Discourse. *Journalism Practice*, 17(1), 5-23. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1930574>
- Ibekwe, S. O. (2022). 'Preventing People from Risking Their Lives at Sea': Forced Migration and the Securitization of Asylum Seekers in Australia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(3), 625-633. <https://doi.org/10.1177/20578911211032514>
- Ipsos. (2022). *World Refugee Day : Global Attitudes Towards Refugees*. Ipsos.
- Karlsen, E., Phillips, J., & Koeth, E. (2011). *Seeking Asylum: Australia's Humanitarian Program*. Canberra: Department of Parliamentary Services.
- Karp, P. (2022). "Factcheck: Is Labor's Policy on Asylum Seekers and Refugees Any Different to the Coalition's?". *The Guardian*. Retrieved October 13, 2024, from <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/apr/19/factcheck-is-labors-policy-on-asylum-seekers-and-refugees-any-different-to-the-coalitions>
- Karp, P. (2023). "Almost 200 Asylum Seekers Returned by Albanese Government since May 2022". *The Guardian*. Retrieved January 21, 2025, from <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/08/australian-government-border-protection-stats-boats-turned-back>

- Kenny, M. A. (2015). "FactCheck: Did 1200 Refugees Die at Sea Under Labor?". The Conversation. Retrieved May 18, 2025, from <https://theconversation.com/factcheck-did-1200-refugees-die-at-sea-under-labor-38094>
- Lidberg, J. (2019). The Distortion of the Australian Public Sphere: Media Ownership Concentration in Australia. *AQ: Australian Quarterly*, 90(1), 12–20. 44.
- Laughland, O. (2013). "Tony Abbott Restates Coalition's Hardline Asylum Seeker Policy". The Guardian. Retrieved May 19, 2025, from <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/tony-abbott-restates-asylum-policy>
- Laughland, O. (2014). "Morrison: Asylum Seekers Should Go Home or Face 'very, very long' Detention". The Guardian. Retrieved January 16, 2025, from <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/25/morrison-asylum-seekers-should-go-home-or-face-very-very-long-detention>
- Leroy, M. (2023). An Island Under Siege: Negative Australian Media Narratives of Asylum Seekers and the Opportunity for Counter-Discourses. *Interventions*, 25(1), 81–99. <https://doi.org/10.1080/1369801X.2022.2080578>
- Loughnan, C. (2019). "Australia's harsh Immigration Policy". The Diplomat. Retrieved May 18, 2025, from <https://thediplomat.com/2019/08/australias-harsh-immigration-policy/>
- Maloney, R. & Deves, E. (2024). "WA Shire President Calls for Greater Military Presence to Stop Boat Arrivals, Flags Biosecurity Concerns". ABC News. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.abc.net.au/news/2024-04-08/asylum-seeker-boat-arrivals-northern-western-australia/103680776>
- Migration Data Portal. (2024). "Migrant Deaths and Disappearances". Migration Data Portal. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-and-disappearances>
- Minister for Home Affairs. (2021). "Joint Media Release with The Hon. Lionel Rouwen Aingimea - New Agreement to Secure Our Region from Maritime People Smuggling". Minister for Home Affairs. Retrieved January 17, 2025, from <https://minister.homeaffairs.gov.au/KarenAndrews/Pages/maritime-people-smuggling.aspx>
- Muharjono & Akbar, H. (2023). *Australia Menghadapi Manusia Perahu*. Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- National Museum Australia. (2024). "Tampa Affair". National Museum Australia. Retrieved May 19, 2025, from <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/tampa-affair#:~:text=The%20federal%20election%20campaign%20started,circumstances%20in%20which%20they%20come'>
- Operation Sovereign Borders. (2022). "Operation Sovereign Borders Monthly Update: February 2022". Australian Border Force. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/osb-monthly-update-february-2022.aspx>
- Operation Sovereign Borders. (2022). "Operation Sovereign Borders Monthly Update: March 2022". Australian Border Force. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/osb-monthly-update-march-2022.aspx>

- [2.aspx](#)
- Otukoya, T. A. (2024). The Securitization Theory. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1747-1755. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0225>
- Phillips, J. (2017). *Australia's Humanitarian Program: A Quick Guide to the Statistics since 1947*. Canberra: Department of Parliamentary Services.
- Refugee Council of Australia. (2024). "Asylum Statistics in Australia". Refugee Council of Australia. Retrieved June 6, 2024, from <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-community/6/>
- Refugee Council of Australia. (2024). "Detention Statistics for Australia". Refugee Council of Australia. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.refugeecouncil.org.au/detention-australia-statistics/2/>
- Refugee Council of Australia. (2024). "Fast Tracking and 'Legacy Caseload' Statistics". Refugee Council of Australia. Retrieved January 21, 2025, from <https://www.refugeecouncil.org.au/fast-tracking-statistics/5/>
- Refugee Council of Australia. (2024). "Offshore Processing Statistics". Refugee Council of Australia. Retrieved January 17, 2025, from <https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/>
- Sajid, I. (2022). "Asylum Seekers Arriving by Boat Not to be Settled in Australia, Says Premier". Anadolu Ajansi. Retrieved January 21, 2025, from <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/asylum-seekers-arriving-by-boat-not-to-be-settled-in-australia-says-premier/2617949#>
- SBS News. (2013). "Full Transcript: Gillard's Asylum Policy Speech". SBS News. Retrieved May 19, 2025, from <https://www.sbs.com.au/news/article/full-transcript-gillards-asylum-policy-speech/zryt3o9fl>
- Stayner, T. (2022). "Scott Morrison Makes Asylum Seeker Policy New Battlefield in Election Campaign". SBS News. Retrieved January 16, 2025, from <https://www.sbs.com.au/news/article/scott-morrison-makes-asylum-seeker-policy-new-battlefield-in-election-campaign/wklaekuvn>
- Watkins, J. (2017). Bordering Borderscapes: Australia's Use of Humanitarian Aid and Border Security Support to Immobilise Asylum Seekers. *Geopolitics*, 22(4), 958–983. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1312350>
- Whyte, S. (2014). "Abbott Offers Asylum Seekers \$10k to Go Home". The Sydney Morning Herald. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.smh.com.au/politics/federal/abbott-offers-asylum-seekers-10k-to-go-home-20140620-3ajr6.html>
- Ziersch, A., Due, C., & Walsh, M. (2020). Discrimination: A Health Hazard for People from Refugee and Asylum-seeking Backgrounds Resettled in Australia. *BMC Public Health*, 20(108), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-8068-3>